



Pemprov Berhasil Raih WTP



TRIBUN PONTIANAK/RIDHO

LAPORAN - Gubernur Kalbar, Sutarmidji menerima laporan hasil pemeriksaan BPK RI dari Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Hery Ridwan pada Rapat Paripurna Istimewa (PSL) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalbar TA 2019 oleh BPK-RI kepada DPRD Kalbar, Jumat (3/7).



■ BPK Temukan Masalah Data Base

PONTIANAK, TRIBUN - Setelah sebelumnya menerima Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) BPK RI pada tahun lalu, akhirnya di tahun ini Pemprov Kalbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Hal ini diketahui dari pernyataan yang diucapkan Anggota 6 BPK RI Prof Dr H Harry Azhar Azis, MA yang hadir melalui telekonferensi pada Rapat Paripurna Istisewa (PSL) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat TA 2019 oleh BPK-RI kepada DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (3/7).

Sebelumnya, dokumen hasil pemeriksaan BPK RI diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Hery Ridwan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalbar dan Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai standar pemeriksaan dapat disimpulkan susunan laporan keuangan Pemprov Kalbar 2019 telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual. Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh secara langsung dan material serta pelaksanaan program kegiatan serta pelaporan keuangan tahun 2019 telah didukung sistem informasi pengendalian internal yang efektif.

"Maka itulah BPK menyimpulkan laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2019

Kami sepenuhnya menerima seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI. Insyallah sebelum 60 hari kita sudah akan menyelesaikan tindak lanjut temuan-temuan.

Sutarmidji
Gubernur Kalbar

kami berkeyakinan untuk memberikan opini kepada Pemprov Kalbar Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP," ujar anggota 6 BPK RI, Prof Dr H Harry Azhar Azis MA.

Pencapaian kali ini, kata dia, patut dibanggakan dan disyukuri ini karena pencapaian tahun sebelumnya WDP atau Wajar Dengan Pengecualian.

WTP ini, disebutnya juga tentu saja dikarenakan usaha keras dan sinergi yang baik antara pimpinan dan jajaran Pemprov Kalbar serta seluruh pemangku kepentingan termasuk BPK.

"Namun demikian BPK menemukan beberapa permasalahan yang agaknya menjadi perhatian Pemprov Kalbar yaitu pengelolaan data base pendapatan pajak kendaraan bermotor, bea

balik nama kendaraan bermotor dan pengelolaan yang belum sepenuhnya memadai serta masih terdapat kelebihan biaya belanja modal," paparnya.

Hal tersebut, kata dia, menunjukkan meskipun opininya WTP, tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan Pemprov Kalbar.

Laporan hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan pimpinan dan anggota Dewan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya baik fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan.

"Saya juga mengingatkan rekomendasi yang diberikan BPK agar segera ditindaklanjuti Gubernur Kalbar dan jajarannya selambat-lambatnya 60 hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Sambut Baik

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyambut baik arahan opini WTP dari BPK RI. Ia meyakini jika opini WTP yang diraih merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan cermat, teliti dan objektif serta tentu mengacu pada standar pemeriksaan yang komperensif dan dapat dipertanggung jawabkan.

"Kami sepenuhnya menerima seluruh temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK RI. Insyallah sebelum 60 hari kita sudah akan menyelesaikan tindak lanjut temuan-temuan.

Rekomendasi yang disampaikan bagi kami juga meru-

pakan bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepan sebagai wujud komitmen transparansi dalam upaya menjalankan tata pemerintahan yang bersih dan berkualitas," kata Midji.

Lebih lanjut, Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini pun menjelaskan perihal ditahun pertama dirinya memimpin mendapat WDP. Midji pun menyebut akan terus mendorong jajaran dapat meningkatkan kualitas kerja.

"Saya ingin menyampaikan, selalu bertanya kenapa yang lalu kita WDP, ada dua temuan yang material. Yang pertama kesalahan kita menganggarkan gaji karyawan hanya 11 bulan, padahal harus di bayar 14 bulan, itu belanja pegawai melebihi Rp 90 miliar," ujarnya. (dho)